MAKALAH
SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN 2019

DISUSUN OLEH :
NAMA : RUKMANAWATI
NIM : 32318015

PROGRAM STUDI D-III FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN
2018

ABSTRAK

Pada tahun 2019 ini Indonesia telah mengadakan pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden. Pada pilpres tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat merugikan masyarakat ataupun pihak dari para politikus Negara , karena banyaknya ancaman-ancaman yang diterima oleh para pejabat tinggi Negara. Pada saat akan dilakukan pengumuman pemenang pilpres terdapat kerusuhan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019. Banyak provokator atau dalang dari kerusuhan tersebut , para pengunjuk rasa datang dari berbagai daerah di Indonesia. Saat itu banyak aparat keamanan ataupun para pengunjuk rasa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Sampai saat ini hasil pemungutan suara pilpres 2019 masih menjadi sengketa di MK.

Pada tahun 2019 ini Indonesia telah mengadakan pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden , pemilihan presiden ini telah diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu pasangan calon pertama Jokowi dengan KH. Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahudin Uno atau Sandiaga Uno.

Pemilihan presiden dilakukan secara serentak di Indonesia pada tanggal 17 April 2019 serta melibatkan banyak masyarakat atau organisasi masyarakat sebagai anggota dari TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pemilihan presiden di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam pemilu seharusnya tidak boleh menggunakan money politic , tetapi sampai saat ini masih ada saja orang-orang yang menggunakan money politic dan pada akhirnya mereka juga tertangkap oleh pihak kepolisian karena hal tersebut berkaitan dengan hukum.

Adapun kendala-kendala yang terjadi saat pilpres berlangsung seperti masalah penyaluran logistik untuk daerah-daerah terpencil .Setelah selesai pemungutan surat suara banyak juga dari anggota TPS yang meninggal dunia akibat kelelahan.

Tidak sedikit juga orang-orang yang saling bermusuhan hanya karena berbeda pilihan , bahkan itu masih keluarga ataupun kerabat sendiri. Bahkan pada saat akan pengumuman pemenang dari pilpres pada tanggal 22 Mei 2019 lalu juga terdapat kerusuhan dan aksi massa di Jakarta yang banyak menimbulkan korban jiwa dari masa itu sendiri ataupun dari aparat keamanan.

Hal tersebut sangatlah mengganggu dan merugikan masyarakat disekitar tempat kejadian, dan kejadian itu terjadi saat bulan Ramadhan yang seharusnya umat Islam bisa menjalankan ibadah dengan tenang tetapi tidak bisa karena kerusuhan tersebut.

Banyak aparat keamanan yang mengadakan razia di jalan untuk menghadang masa yang akan pergi ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa. Para masa juga membawa banyak senjata tajam. Saat kejadian itu polisi telah mengamankan banyak provokator dari aksi unjuk rasa tersebut dan memintai keterangan dari orang-orang tersebut.

Para pengunjuk rasa datang dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah polisi menyelidiki ternyata para demonstran tersebut juga dibayar oleh dalang kerusuhan tersebut, sampai saat ini polisi masih mengusut siapa dalang dibalik kerusuhan 22 mei tersebut.

Banyak juga orang-orang yang membuat pengancaman untuk pasangan calon presiden dan para pejabat-pejabat tinggi negeri, ancaman tersebut berupa ancaman pembunuhan tetapi polisi sudah menangkap pelaku tersebut.

Tetapi sampai saat ini hasil pemungutan surat suara masih menjadi sengketa. Salah satu dari pasangan calon tidak terima atas kekalahannya lalu dan merasa jika dirinya dicurangi. Pasangan calon nomor urut 2 membawa kasus ini ke MK (Mahkamah Konstitusi). MK merupakan lembaga tinggi ketatanegaraan yang memiliki wewenang diantaranya menggelar sidang pilpres.

dan sampai saat ini masih dilakukan sidang dan mendatangkan saksi-saksi TPS dari berbagai daerah di Indonesia. Tetapi pada saat sidang berlangsung banyak saksi dari pasangan nomor urut 2 seperti berkata tidak jujur dan banyak kebohongan.

Tidak sedikit juga saksi yang datang saat persidangan itu datang karena dibayar dan saksi-saksi tersebut tidak terlalu benar dalam memberikan kesaksian.

Dari kasus diatas seharusnya para saksi tidak boleh menerima uang atau barang apapun hanya untuk memberi kesaksian. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan

etika seorang manusia karena dalam memberikan kesaksian itu para saksi harus bicara sebenar-benarnya sama dengan apa yang dilihat atau dialami olehnya.

Apabila mereka mau menerima uang ataupun barang sama saja itu artinya dengan menerima suap.

Jika dilihat dari sudut pandang etika pada bab hati nurani, orang tersebut memiliki hati nurani yang tumpul karena mereka kurang peka pada nilai-nilai kebenaran.

Tindakan manusia dibedakan menjadi 2 yaitu *actus hominis* yang berarti semua tindakan manusia sama levelnya dengan binatang dan *actus humanus* yang berarti tindakan yang manusiawi atau manusia menjadi tuan atas tindakannya sendiri.

Dari kasus diatas tindakan mereka merupakan tindakan *actus hominis* atau tindakan yang buruk karena menyimpang dari nilai-nilai kebaikan atau kebenaran. Seharusnya para saksi tersebut berusaha menjadi *actus humanus* atau bertindak secara sadar dan berbuat baik.

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka barang siapa yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Struktur tindakan manusia ada 2 yaitu *voluntary* yang berarti tindakan yang dikehendaki dan *involuntary* yang berarti tindakan yang tidak dikehendaki. dari kasus di atas para saksi saja bertindak karena kemauannya sendiri hanya ingin mendapatkan uang.

Dalam berpolitik seharusnya juga menggunakan nilai-nilai etika supaya para politikus tidak terjerumus kedalam hal yang salah. Tetapi pada saat ini mereka tidak terlalu

mementingkan etika dalam kehidupan sehari-hari , menurut mereka yang terpenting adalah mereka bisa mendapatkan jabatan dan berbuat semena-mena pada rakyat kecil.

Para saksi tidak bertindak jujur atau berkata sebenar-benarnya tetapi malah berbeli-belit yang menyebabkan sidang tidak berjalan dengan lancar. Seperti contohnya ada saksi yang menunjukkan bukti berupa surat suara yang digunakan pada tanggal 17 april 2019 , menurutnya dia menemukan itu ditempat sampah di kecamatan boyolali tetapi sebenarnya itu tidak benar. Itu hanyalah sampah bekas surat suara.

Kebohongan juga merupakan tindakan kejahatan karena berakibat buruk dari perbuatan fisik manusia , kejahatan juga bukan sekedar wujud kelemahan manusia karena telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Kejahatan manusia berkaitan dengan manusia sebagai subjek yang bebas dan kejahatan moral menyentuh langsung realitas kodrati bahwa kita mempunyai kebebasan.

Tatanan moral subjektif dimaksudkan secara langsung tatanan moral sebagai subjek pelaku perbuatan. Hukum merupakan hal yang mengikat sekaligus peraturan yang dihimpun bersama , hukum menampilkan kekuatan yang bukan dalam hubungan dengan kekuatan fisik tapi kekuatan melarang dan memerintah secara legal , juga secara moral.

Hukum terdiri dari hukum ilahi dan hukum natural , keduanya saling berkaitan karena keteraturan kodrat kehidupan ini sudah sedemikian sempurna , sehingga manusia diundang untuk menata hidupnya selaras dengan natura. Maka dari itu setiap manusia pasti memiliki akal budi.

Menurut saya jika ada pilpres atau pilkada tidak harus berdebat dengan sesama , karena jika kita memilih itu harus dirahasiakan tidak perlu diumbar. Kita sebagai

masyarakat Indonesia harus pintar-pintar membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Mau bagaimanapun kita bertindak semena-mena kita tetap berada dibawah undang-undang yang menaungi kita. Tetapi terkadang kejahatan manusia muncul dari karena adanya kebebasan , hanya kebebasan lah yang membuat tindakan manusia ada dalam lapangan moral , dan karena kebebasan itulah manusia juga bisa berbuat menyimpang dalam kebaikan.

Maka dari itu sebaiknya kebebasan digunakan untuk berbuat baik. Kebebasan mengandalkan 2 hal yaitu tahu dan mau yang artinya hanya apabila manusia itu menghendaki dan mengetahui.

Perbuatan moral merupakan tindakan manusia sebagai manusia. Perbuatan moral mencetuskan kodrat manusiawi dan sekaligus mulia.

Tindakan para saksi diatas merupakan directly voluntary yaitu atas kehendaknya sendiri dan keputusan bertindak ada dalam kuasa si pelaku , mereka juga tahu konsekuensi apa yang akan didapatkan.

Tindakan tersebut juga termasuk tindakan moral yang buruk karena dapat merugikan pihak lain atau orang lain , bisa juga tindakan tersebut dapat menjadi sebuah fitnah karena perkataan yang tidak benar.

Hubungan politik dan moral itu langsung dan konkret , langsung yang berarti segala tindakan politik pasti segera berhubungan dengan pertimbangan moral. Sedangkan konkret yang memiliki arti hubungan itu tidak dalam lapangan teoritis , melainkan dalam lapangan kenyataan.

Dalam berpolitik harus berbuat jujur dalam bidang apapun. Supaya tidak ada pihak yang rugi ataupun terbebani karena perbuatan yang tidak diinginkan. Politik juga harus bertindak adil atau bisa disebut dengan politik keadilan.

Para saksi-saksi dalam sidang tentu memiliki tujuan tersendiri. Termasuk salah satunya menjatuhkan salah satu kubu karena persaingan yang berat. Mungkin saksi tersebut bisa mendapatkan kebahagiaan dengan dia menjadi saksi.

Kebahagiaan mungkin menjadi target tindakan manusia dan kebahagiaan dapat menjadikan nilai hidup manusia sedemikian rupa sehingga dia benar-benar tampil sebagai ciptaan yang mempesona.

Dilihat dari kasus diatas seharusnya kita bisa bersatu karena perbedaan. Bisa dicontoh dari Indonesia yang memiliki banyak suku , budaya dan bahasa bisa bersatu. Tetapi mengapa dengan hanya perbedaan pilihan saja bisa menjadi hancur dan saling mencaci dan bermusuhan.

Tidak seharusnya kita saling bermusuhan. Sebaiknya kita harus menjunjung tinggi nama persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia , seperti halnya yang terdapat pada pancasila , sila ke 3 yaitu persatuan Indonesia.

Dalam berpolitik tidak harus dengan menghalalkan segala cara tetapi seharusnya kita tetap memperjuangkan kita dengan cara yang benar. Supaya generasi Indonesia selanjutnya dapat maju dan bisa menjadi Negara yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia).

Dewantara, A. W. (2017). DIKTAT ETIKA-FILSAFAT MORAL. *Yogyakarta: PT KANISIUS*.

Televisi : TVRI , TV ONE